

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Program Sekolah Swasta Gratis Bisa Tekan Angka Kemiskinan

DPRD DKI Jakarta terus berupaya mewujudkan program sekolah gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. Komitmen mengawal program yang telah diperjuangkan oleh Komisi E (bidang pendidikan) periode 2019-2024, terus bermunculan.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Chicha Koeswoyo menyatakan, siap mengawal program tersebut agar bisa terealisasi pada tahun ajaran 2025.

Mantan penyanyi ini berharap, program itu mampu memutus mata rantai pengangguran dan menekan angka kemiskinan di Jakarta.

Dengan pendidikan, kapasitas dan kualitas anak-anak terhadap ilmu pengetahuan juga meningkat. Selain itu, ijazah sekolah mereka bisa dipakai sebagai bekal melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau bekerja.

"Sekolah swasta gratis merupakan salah satu solusi," ujar Chicha dari PDI Perjuangan pada Rabu (23/10/2024).

Chicha juga mendorong koleganya di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta agar merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendidikan. Perda itu perlu direvisi untuk memasukan program pendidikan sekolah swasta gratis.

Dengan begitu, program sekolah gratis, memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga kualitas pendidikan di sekolah negeri maupun swasta bisa setara.

"Pendidikan swasta gratis, menurut saya bagian dari upaya melakukan pemerataan pendidikan," kata Chicha.

Menurutnya, masih banyak terjadi ketimpangan sosial akibat tidak bisa mencari kerja karena ijazah tertahan di sekolah. Dia memandang,

persoalan ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi eksekutif maupun legislatif di DKI Jakarta.

"Banyak masyarakat yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi atau mencari pekerjaan dikarenakan tidak bisa menebus ijazahnya," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, rencana program sekolah swasta gratis yang diimpikan DPRD DKI Jakarta terancam batal dilaksanakan pada 2025 mendatang. Alasannya, program tersebut masih terganjal regulasi sebagai alas hukum sebuah kebijakan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Purwosusilo meminta kepada DPRD DKI Jakarta agar merevisi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendidikan. Payung hukum itu akan menjadi dasar Pemprov DKI Jakarta untuk mengeksekusi program sekolah swasta gratis.

"Harus ada regulasi yang memayungi seperti Perda Pendidikan harus selesai (direvisi). Perda pendidikan harus selesai sebagai payung hukum utama yang akan kami laksanakan untuk sekolah gratis," kata Purwo saat rapat kerja dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta pada Rabu (23/10/2024).

Purwo mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah mengajukan permohonan untuk merevisi Perda Pendidikan lewat Badan

Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta pada 2023 lalu. Dia berharap, agar permohonan itu dapat segera dibahas, untuk menambah klausul tentang sekolah gratis di rancangan regulasi itu. (faf)



istimewa